

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Gunakan Konsep Rusunawa Dibanding Hunian DP 0 Rupiah

Gambir, Warta Kota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan konsep rumah susun sederhana (rusunawa) dibanding membangun hunian DP 0 Rupiah. Partai pemenang di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu memandang hunian DP 0 Rupiah yang dibangun era Gubernur Anies Baswedan telah salah sasaran.

"Awalnya DP 0 Rupiah diperuntukan rakyat miskin atau MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Ini MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta per bulan (syarat kepemilikan rumah), saya kira sudah bukan orang miskin lagi," ujar Gembong pada Kamis (3/11/2022).

Gembong menyarankan, sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta fokus pada pembangunan rusunawa. Konsep ini pernah diterapkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa tahun lalu.

"Ini agar APBD bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Kalo bicara DP 0 Rupiah mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala DPRKP) ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan tapi yang pasti dari sisi peruntukan, bahwa DP 0 ini tidak tepat sasaran," jelas anggota Banggar DPRD DKI Jakarta ini.

Diketahui, Banggar DPRD DKI Jakarta bersama TAPD DKI Jakarta

menggelar rapat KUA-PPAS untuk APBD 2023 sebesar Rp 85 triliun. Dalam rapat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta memaparkan bahwa belanja daerah untuk aspek hunian kena restrukturisasi dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,22 triliun.

Diberitakan sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko memberikan klarifikasi terkait program DP 0 rupiah yang diduga menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

"Program DP 0 Rupiah itu sumbernya dari pengembang, jadi tidak menggunakan APBD," ujar Sarjoko saat dihubungi, pada Kamis (3/11/2022). (faf)